

**PARTISIPASI POLITIK SANTRI DI KOTA SUBULUSSALAM  
PADA PILEG 2019**

(Studi Kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah  
Perbatasan Minhajussalam)

**SKRIPSI**

Oleh :

**TEGUH ANAN ERSA**

**NIM. 160801071**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Anan Ersa

Nim : 160801071

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 09 November 2022  
Yang membuat pernyataan,



**A R - R A N I** **TEGUH ANAN ERSA**  
NIM. 160801071

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PARTISIPASI POLITIK SANTRI DI KOTA SUBULUSSALAM  
PADA PILEG 2019 (Studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan  
Dayah Perbatasan Minhajussalam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Jurusan Ilmu Politik**

**Oleh :  
TEGUH ANAN ERSA  
NIM. 160801071**

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.**  
NIP. 196407051996031001

**Aklima, S.Fil. I., M.A.**  
NIP. 198810062019032009

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PARTISIPASI POLITIK SANTRI DI KOTA SUBULUSSALAM  
PADA PILEG 2019 (Studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan  
Dayah Perbatasan Minhajussalam)**

**SKRIPSI**

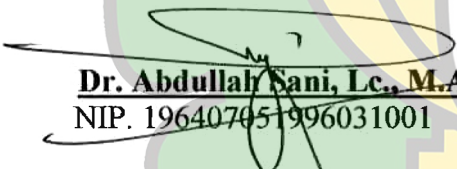
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik.

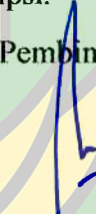
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil awal 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

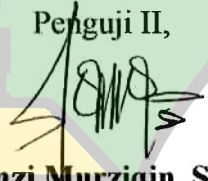
  
Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.  
NIP. 196407051996031001

  
Aklima, S.Fil. I., M.A.  
NIP. 198810062019032009

Penguji I


Penguji II,

  
Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
NIP. 198812072018032001

  
Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.  
NIP. 198605132019031006

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
**UIN Ar-Raniry**



  
Dr. Muji Mulla, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Dayah atau pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa dayah adalah lembaga pendidikan yang para santri bertempat tinggal di dayah tersebut (pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan pimpinan oleh teungku Dayah. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan partisipasi politik yang dilakukan oleh santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019; Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatis deskriptif Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjawab Permasalahan yang ingin diteliti. Hasil dari penelitian ini partisipasi politik santri di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Subulussalam adalah partisipasi aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri di Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam: (a) Para santri secara formal tidak mendapatkan pendidikan dan pemahaman politik secara teori baik langsung maupun tidak langsung dari pihak pondok pesantren; (b) Kesadaran politik para santri dalam konteks partisipasi cukup tinggi, namun hanya terbatas pada pemberian suara. Di luar hal itu, para santri tidak melakukan aktivitas lainnya; (c) Kiai memiliki pengaruh yang kuat terhadap para santri. Namun demikian, pengaruh tersebut hanya terbatas pada bidang keagamaan, sedangkan dalam hal politik, kiai hanya memberikan preferensi politik.

Keyword: *Partisipasi, Preferensi, Pesantren, politik.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak” Tidak lupa pula, selawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penelitian skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan dalam penelitian dan kehidupan peneliti.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

6. Aklima, S.Fil. I., M.A. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada peneliti.
8. Teristimewa peneliti persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dorongan yang luar biasa selama peneliti mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta peneliti berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Beserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penelitian skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
9. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2016 yang telah bersama-sama ketika suka maupun duka selama kuliah dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Peneliti berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapakan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi peneliti. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 08 November 2022

Penulis,

Teguh Anan Ersu

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Fokus Penelitian .....	5
1.3.Rumusan Masalah .....	5
1.4.Tujuan Penelitian.....	6
1.5.Manfaat Penelitian.....	6
1.6.Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2.Teori Partisipasi Politik.....	13
2.3. Teori Pola Relasi .....	20
2.4.Kerangka Konseptual .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	26
3.2. Lokasi Penelitian.....	26
3.3. Objek dan Subjek Penelitian.....	26
3.4. Sumber data .....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6. Teknik Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Gambara Umum Penelitian.....	34



4.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi Kota Subulussalam....	34
4.1.2. Demografis Kota Subulussalam.....	35
4.1.3. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam .....	37
4.1.4. Pondok Pesantren Minhajussalam .....	38
4.2. Partisipasi Santri Kota Subulussalam .....	39
4.2.1. Partisipasi Politik Santri Pesantren Raudhatul Jannah.....	41
4.2.2. Partisipasi Politik Santri Pesantren Minhajussalam.....	45
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri di Kota Subulussalam pada pemilihan legislatif 2019.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

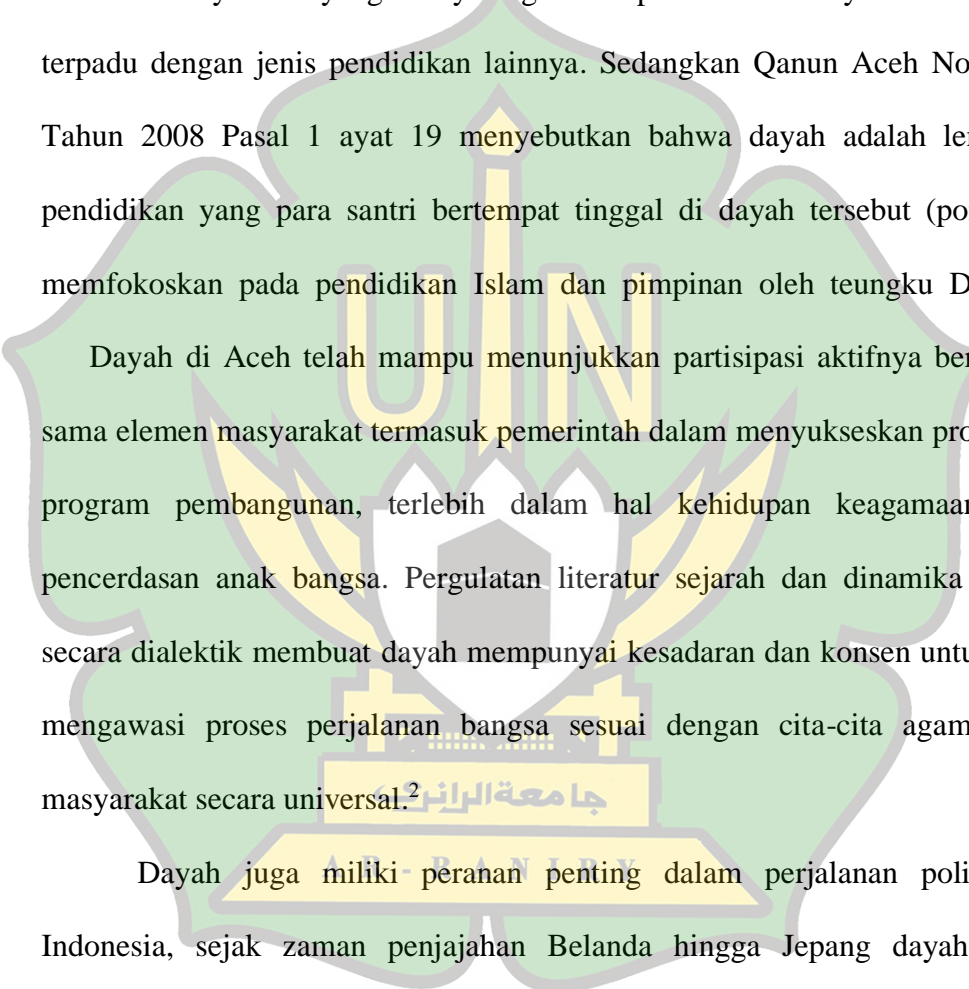


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dayah atau pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 19 menyebutkan bahwa dayah adalah lembaga pendidikan yang para santri bertempat tinggal di dayah tersebut (pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan pimpinan oleh teungku Dayah.<sup>1</sup>

Dayah di Aceh telah mampu menunjukkan partisipasi aktifnya bersama-sama elemen masyarakat termasuk pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan, terlebih dalam hal kehidupan keagamaan dan pencerdasan anak bangsa. Pergulatan literatur sejarah dan dinamika sosial secara dialektik membuat dayah mempunyai kesadaran dan konsen untuk ikut mengawasi proses perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita agama dan masyarakat secara universal.<sup>2</sup> 

Dayah juga memiliki peranan penting dalam perjalanan politik di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda hingga Jepang dayah telah mengambil andil besar dalam kancah politik untuk mengusir penjajahan, bahkan tidak sedikit para pahlawan Indonesia termasuk Aceh yang berasal dari alumni dayah. Tidak hanya terlihat secara langsung dalam politik seperti mendirikan berbagai organisasi Islam dayah juga telah berhasil menjadikan

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 19

<sup>2</sup> Mashuri, Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah. *Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII. No. 2.* (Februari). (<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/didaktika/article/download/477/395>)

negara kesatuan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dayah telah mengambil kedudukan penting dan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial politik di Aceh.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian Mas' Ud Abdurahman yang dikutip oleh Aklima, dkk bahwa Islam dayah memiliki nilai-nilai yang mengandung tiga unsur dalam pembentukan hubungan patron-klien berdasarkan pertukaran tidak seimbang yang mencerminkan perbedaan status. Seorang klien, dalam hal ini santri, sudah banyak menerima pelayanan dari patron, kiai, sehingga klien terikat dan bergantung pada patron. Hubungan patron-klien bersifat pribadi seperti rasa kepercayaan dan ketergantungan dalam hubungan. Hubungan patron adalah komprehensif, fleksibel, dan tidak dibatasi waktu. Hal ini dimungkinkan karena sosialisasi nilai ketika menjadi santri berlangsung bertahun-tahun.<sup>4</sup>

Di Aceh diketahui bahwa terdapat dua jenis dayah yakni dayah salafi yang hanya fokus pada pendidikan agama Islam dan dayah modern/ terpadu yang selain memberikan pendidikan agama juga terdapat pendidikan umum.<sup>5</sup> Polarisasi pendidikan di dua tempat ini jauh berbeda meski sama-sama lembaga berlandaskan agama atau lebih familier di Aceh dikenal dengan Dayah.

---

<sup>3</sup> Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 17

<sup>4</sup> Aklima, Ramzi Murziqin, Reni Shintasari dan Aja Sanawiyah, *Partisipasi Politik Santri dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*, *Jurnal Ilmu Politik* Vol.3 No.2, h. 208-209 Website : <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN : 2685-6670 (Online), diakses tanggal 18 April 2022.

<sup>5</sup> Ibid, h. 20.

Di antara lembaga pendidikan dayah yang masih bersifat tradisional yang terdapat di Kota Subulussalam ialah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Minhajussalam. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah saat ini dipimpin oleh seorang ulama kharismatik. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah kini memiliki sekitar 1200 santri yang tidak hanya berasal dari berbagai wilayah Aceh tetapi juga luar provinsi bahkan luar negeri. Sedangkan jumlah tenaga pengajar (laki-laki dan perempuan) sekitar 102 orang. Sejak berdirinya dayah salafi tersebut telah banyak melahirkan kader-kader penerus dan tidak sedikit dari mereka juga telah menjadi cendekiawan muslim dengan membangun cabang-cabang Pondok Pesantren Raudhatul Jannah lainnya di seluruh Provinsi Aceh.

Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ini telah eksis dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik, seperti pertemuan para tokoh politik seperti yang dilakukan dengan calon pemimpin yang akan naik dalam pemilu seperti pemilihan wali kota dan anggota DPRK dan DPRA. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yang melibatkan tokoh politik ialah dengan mengadakan kegiatan muzakarah para ulama yang mengikutsertakan para tokoh politik partai yang akan mengikuti Pemilu Legislatif seperti calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksistensi pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam menyelenggarakan kegiatan agama yang disertai oleh para politisi tentu mempengaruhi berbagai pihak yang terdapat di dayah tersebut, mulai para santri, tenaga pengajar bahkan hingga

pimpinan untuk berpartisipasi dalam perpolitikan Aceh, termasuk pada Pileg yang diadakan tahun 2019.

Keterlibatan para santri Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam politik dapat terlihat sebelum berlangsung pemilihan sebagian santri ikut menghadiri berbagai kegiatan kampanye yang diadakan oleh pasangan calon dari partai politik tertentu, bahkan saat hari pemilihan pun sebagian santri juga terlibat menjadi panitia penyelenggara seperti anggota TPS dan lain sebagainya.

Pemilihan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sebagai lokasi penelitian dikarenakan keterlibatan anak dari salah satu donatur pembangunan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam Pileg 2019. Selama jalannya masa kampanye terlihat adanya kedekatan pihak antara pengurus dayah dengan pihak tim sukses calon legislatif tersebut. Selain memiliki andil dalam pembangunan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, sosok orang tua calon legislatif tersebut juga menjadi salah satu tokoh yang disegani dalam masyarakat, karena banyak membantu ekonomi masyarakat setempat.

Sementara itu Pondok Pesantren Minhajussalam merupakan salah satu pondok pesantren yang secara geografis berbeda dengan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yakni berlokasi di kawasan pedesaan jauh dari perkotaan. Jika di kedua pesantren ini dalam partisipasinya berpolitik jelas berbeda, dimana Pondok Pesantren Minhajussalam terlihat minim dalam kegiatan politik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berbagai agenda politik seperti Pileg dan pemilihan wali Kota Subulussalam Pondok Pesantren



Minhajussalam juga mengambil andil dalam menarik perhatian para pasangan kandidat. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Partisipasi Politik Santri Di Kota Subulussalam Pada Pileg 2019 (Studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam).

### **1.2 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah partisipasi politik santri di Kota Subulussalam pada pileg 2019 (studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi politik yang dilakukan oleh santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislative Kota Subulussalam tahun 2019.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Partisipasi Politik Santri Di Kota Subulussalam Pada Pileg 2019 (Studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam).

##### **1.5.2 Secara praktis**

- a. Bagi pengurus dayah, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan partisipasi politiknya dalam berbagai kegiatan politik terutama dengan memberikan pandangan-pandangan positif terhadap pelaku elit politik dalam pemilu.
- b. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang Partisipasi Politik Santri Di Kota

Subulussalam Pada Pileg 2019 (Studi kasus: Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi digunakan untuk menjadi landasan penulisan, agar skripsi yang di tulis terstruktur dan sistematis, Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi dan penjelasan istilah.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Bab tinjauan pustaka ini meliputi: penelitian terdahulu yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. landasan teori yang berisi Teori Pola Relasi, dan Teori Partisipasi Politik.

**BAB III METODE PENELITIAN** Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bab metode penelitian meliputi: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP** pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, demikian pula dengan Skripsi ini untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti melihat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini guna menghindari persamaan terhadap objek kajian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti:

Hasil kajian Rofik Anwar dengan mengangkat tema “*Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada Pilpres 2014*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh santri pondok pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini dapat dilihat dari data responden dimana jumlah golput lebih sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi para pemilih pemula di pondok pesantren Wahid Hasyim pada Pilpres 2014 dan dibagi dalam dua faktor yaitu internal yakni rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih, sedangkan faktor eksternal karena kesibukan sehari-hari, TPS berada di luar kota atau tidak terjangkau serta tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asalnya.<sup>6</sup>

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan peneliti teliti. Persamaan terlihat pada objek kajian yaitu Pemilu. Namun,

---

<sup>6</sup> Rofik Anwar, *Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2014), h. ii.

Pemilu yang dikaji berbeda jika Ahmad Patrioy melihat Pemilu untuk memilih kepala negara/presiden, sedangkan peneliti menitik beratkan kajian pada Pemilu kepala daerah. Begitu juga subjek kajiannya terdapat persamaan yakni sama-sama melihat partisipasi pelajar dayah, namun dayah yang menjadi lokasi kajian berbeda. Jika Rofik Anwar memfokuskan pada pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, sedangkan peneliti santri Dayah Al-Muhajirin Kabupaten Aceh Besar. Persamaan mendasarkan juga terlihat dari metode penelitian, dimana karya Ahmad Patrioy melihat kajiannya berdasarkan teori hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya yang berlandaskan teori pelaku politik.

Kajian lain yang mengambil objeknya pesantren atau dayah ialah hasil penelitian Rudi Subiyakto dengan mengangkat judul "*Keterlibatan Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)*". Menurut kajiannya disimpulkan bahwa keterlibatan Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*: kiai sebagai aktor, artinya kiai yang masuk dalam partai politik tertentu dan menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Aktivitas politik yang mereka lakukan adalah dengan mengenalkan pasangan calon yang didukungnya kepada masyarakat melalui mimbar-mimbar agama. Para Kiai juga tidak sungkan mengajak pasangan calon dalam setiap agenda sosial kemasyarakatan baik yang diselenggarakan masyarakat sendiri atau pihak pesantren. *Kedua*, Kiai sebagai partisipan, yaitu mereka yang sebenarnya sudah masuk kedalam partai politik tertentu dan namanya tercantum dalam tim sukses. Namun, mereka tidak secara terbuka



mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kiai ini berpandangan bahwa masyarakat pada dasarnya akan mengetahui dan mengikuti dengan sendiri mengenai pilihan politik Kiai. Kiai model ini juga mempersilahkan dan mendorong mesin politik (kader partai) bergerak lebih banyak dari pada dirinya. Hal ini agar peran Kiai sebagai pemimpin agama tetap terjaga dengan baik. Namun demikian, model Kiai seperti tidak mencari keuntungan pragmatis. Mereka tetap hanya menerima (kalau toh ada yang memberi) bantuan dari pasangan calon yang mereka dukung.<sup>7</sup>

Kajian kedua ini juga memiliki persamaan yang amat mendasar dari kajian yang akan peneliti lakukan. Kesamaanya terlihat dari aspek tokoh yakni Kiai dari sebuah lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana kajian yang akan peneliti lakukan terkait sosok Kiai yang bernama Abi Lampisang yang memiliki pengaruh besar dalam mengajar santri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemenangan Paslon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam Pilkada 2017. Sekalipun karya di atas memiliki persamaan, namun karya tersebut tidak mengkaji sosok seorang tokoh sebagaimana yang akan peneliti lakukan, melainkan mengkaji peran Kiai secara umum dalam Pilkada Kabupaten Banjarnegara tahun 2006.

Kajian yang ditulis oleh Almuhammad dengan judul "*Politik Penyetaraan Dayah di Aceh*". Kajian ini menjelaskan bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan

---

<sup>7</sup> Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006)*, Skripsi. (Yogyakarta: 2008), h. 2

penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara atau daerah. Dayah sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh, telah memainkan perannya dalam membangun negeri ini, mengalami pasang surut dalam legalitasnya. Pasca Tsunami dan MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki, dayah “meminta hak” agar tidak lagi dianak tirikan dengan lembaga pendidikan lain yang ada di Aceh. Hasil usahanya, dayah akhirnya mendapatkan legalitas dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga Formal yang disejajarkan dengan pendidikan formal lainnya, serta alumninya bisa diterima di beberapa instansi pemerintah dan swasta, walaupun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA). Fenomena sekarang telah menunjukkan bahwa Dayah dan Pemerintah Aceh telah memiliki simbiosis mutualisme antara keduanya.<sup>8</sup>

Penelitian ketiga ini juga memiliki persamaan yakni sama-sama melihat bagaimana pihak dayah atau pesantren terlibat dalam politik, khususnya pemilu atau pileg. Namun yang membedakan terlihat di mana kajian sebelumnya mengkaji secara umum politik penyetaraan dayah di Aceh, sementara kajian yang penelitian eksistensi Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam perpolitikan Kota Subulussalam Pada Pileg 2019”.

Penelitian Hamdan Haris berjudul “*Patronase dan Afiliasi Santri Pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena patron-klien yang terjadi di pondok

---

<sup>8</sup> Almuhammad, Politik Penyetaraan Dayah di Aceh, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 25 Nomor 2, (Lhosumawe: STAIN Malikussaleh, 2014), h. 52.

pesantren Darul Arqam Gombara memberikan gambaran kepatuhan dan rasa segan Santri pada Kyai/ustadz/alumni yang dinilai mempunyai Kharisma, dan kedekatan khusus dengan mereka. Bentuk tersebut mempengaruhi perilaku politik beberapa santri, hal ini terlihat dari beberapa Santri dari masa ke masa yang mempunyai afiliasi tersendiri dengan sosok Kyai/Ustadz/alumni pada masanya.<sup>9</sup>

Penelitian Jedri dan Tinov berjudul “*Analisis Hubungan Patron-Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses terjadinya hubungan patron-klien yang terjadi di daerah/desa-desa mayoritas masyarakat Jawa khususnya di Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan Kecamatan Logas Tanah Darat telah memenuhi ciri-ciri patron-klien, yaitu adanya pemilikan sumber daya ekonomi dan politik yang tidak seimbang, sehingga adanya hubungan saling ketergantungan, saling memberi dan menerima (asas timbal balik). Kemudian ada juga hubungan loyalitas dan hubungan yang mempribadi (personalized relationships). Terjadinya struktur ketergantungan tokoh etnis Jawa dan masyarakat Jawa terhadap H. Sukarmis di daerah mayoritas masyarakat Jawa yang tersebar di Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan Kecamatan Logas Tanah Darat di keretakan tingkat perkonomian dan sumber daya politik yang dimiliki masyarakat Jawa dan tokoh etnis Jawa yang rendah. H. Sukarmis yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang tinggi dan menguasai

---

<sup>9</sup> Hamdan Haris, *Patronase dan Afiliasi Santri Pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2018), h. iv

sumber-sumber yang ada disekitarnya, akan selalu berusaha membantu dan menawarkan bantuan kepada tokoh dan masyarakat Jawa, baik berupa bantuan bersifat pribadi, lapangan pekerjaan dan peneintensifkan pembangunan diderah mayoritas masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>10</sup>

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang sudah peneliti sajikan dapat dilihat bahwa tidak satupun penelitian yang secara spesifik serupa dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mengenai Pengaruh Patron-Client Terhadap Partispasi Politik Santri Di Kota Subulussalam Pada Pileg 2019.

## **2.2 Teori Partisipasi Politik**

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang di ucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau defenisi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah

---

<sup>10</sup> Jedri dan Tinov, *Analisis Hubungan Patron-Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*, Jurnal Politik Vol 1 No 2 (2012), h. 12.

ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.<sup>11</sup>

Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.<sup>12</sup>

Politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>13</sup>

Kemudian politik juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari kepolitikan. Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Pada sebuah kelompok masyarakat, dalam menghadapi terbatasnya sumber daya, perlu dicari suatu cara distribusi supaya seluruh masyarakat merasa bahagia dan puas. Cara inilah yang disebut politik. pada umumnya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh

---

<sup>11</sup> Prasetya, Teguh Iman. (2008). Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumpun “Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”. Artikel <http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/01> di akses pada 12 juli 2022

<sup>12</sup> Prasetya, Teguh Iman. (2008). Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumpun “Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”. Artikel <http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/01> di akses pada 12 juli 2022

<sup>13</sup> Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. Hlm 3.



masyarakat, supaya dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.<sup>14</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satu sifat dasar demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elit untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik, maka dukungan warga tersebut di namakan dengan keikutsertaan di dalam pemilihan umum guna untuk memilih orang atau partai untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut.<sup>15</sup>

Pengertian partisipasi politik diatas juga diperkuat oleh Samuel P. Huntington dan Joan M.Nelson didalam buku Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintahan. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>16</sup>

Partisipasi politik masyarakat telah menjadi isu dan kajian menarik baik pemerintah, para akademisi, praktisi maupun profesional, karena partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>15</sup> Saiful Mujani, R William Widdle, Kuskrido Ambardhi, 2012. *Kuasa Rakyat*, Jakarta Erlangga

<sup>16</sup> Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama, 2008), h. 367

<sup>17</sup>Halim, Rahmawati & Lalongan, Muhlin. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik*. Makassar : CV Sah Media

Pada umumnya partisipasi politik merupakan suatu budaya dalam hal terdapat partisipasi yang sangat tepat dalam struktur politik demokratis. Dengan kata lain, masyarakat yang turut serta berpartisipasi memiliki kemanfaatan sebagai subjek, mematuhi tata aturan pemilihan umum dan partai politik, loyal, namun pada satu sisi masyarakat juga mengharapkan memiliki andil dalam bentuk pengambilan keputusan politik.<sup>18</sup>

Pada implementasinya sangat disayangkan, ternyata makna dan tingkatan partisipasi politik masyarakat seringkali menjadi masalah yang menyita perhatian karena ada masyarakat yang antusias terlibat dalam proses pemilihan umum, namun ada juga masyarakat yang terlihat apatis dengan perkembangan perpolitikan terutama pada saat pelaksanaan pemilihan umum.<sup>19</sup>

Secara garis besar, bentuk partisipasi politik dibagi dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Partisipasi politik yang positif adalah memberikan suara dalam pemilu, berkampanye, berkomunikasi dengan pejabat atau politikus. Adapun bentuk partisipasi politik yang negatif antara lain berupa kegiatan berdemonstrasi, mengadakan unjuk rasa, dan mengajukan protes.<sup>20</sup>

Partisipasi politik dapat dilakukan dengan banyak cara. Partisipasi langsung melalui keikutsertaan secara aktif dalam suatu partai politik tertentu ataupun dengan memberikan suara selama Pemilu. Hal lain yang juga dapat

---

<sup>18</sup>Halim, Rahmawati & Lalongan, Muhlin. 2016. Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik. Makassar : CV Sah Media

<sup>19</sup>Halim, Rahmawati & Lalongan, Muhlin. 2016. Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik. Makassar : CV Sah Media

<sup>20</sup>Amatullah Shafiyah, Haryati Soeripno, Kiprah politik Muslimah : Konsep dan implementasinya: Jakarta Gema Insani 2003

dilakukan dengan demonstrasi untuk menentang atau mendukung suatu keputusan politik tertentu. Sementara partisipasi tidak langsung dapat terjadi melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bisa melalui pendidikan politik misalnya.<sup>21</sup>

Partisipasi secara harfiah merupakan keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen.

Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian di kenal dengan nama "Piramida Partisipasi Politik". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.<sup>22</sup>

Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik, Firmansyah dalam bukunya yang berjudul Persaingan, legitimasi, dan marketing Politik mengemukakan beberapa faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Firmanzah. 2010. Persaingan, Legitimasi, Dan Marketing Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

<sup>22</sup> Suryadi. 2007. Cara Efektif Memahami Perilaku Anak Usia Dini. Jakarta. Penerbit EDSA Mahkota

<sup>23</sup> Firmanzah. 2010. Persaingan, Legitimasi, Dan Marketing Politik, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

1. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
2. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat terpenting dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, hal ini bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.<sup>24</sup>

Salah satu yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik.

Sebagian negara-negara di dunia, lembaga pendidikan dan kurikulumnya berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik bagi setiap anak-anak didiknya, baik di negara komunis, otoriter maupun yang

---

<sup>24</sup> Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Partisipasi Politik. Semarang : IKIP Semarang Press

demokratis. Di samping pendidikan dan perbedaan jenis kelamin setatus sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dalam partisipasi pemilih dalam demokrasi, partisipasi pemilih pemula sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemilihan yang adil, bebas dan rahasia. Partisipasi pemilih pemula dapat memberikan semangat baru dalam dunia demokrasi dengan hadir dan keikutsertaan para pemilih pemula di dalam dunia politik.


Sikap antusias dari pemilih pemula dalam kesadaran politik tentunya dapat membawa pada konsekuensi tatanan politik yang stabil, karena dengan kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik. Pemilih pemula dengan kesadaran dan pemahaman politik sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Dengan demikian partisipasi pemilih pemula ini merupakan suatu proses untuk menjadi dewasa dan siap meninggalkan usia remajanya dikala mereka sudah diberikan hak untuk memilih, walaupun hak tersebut baru pertama kalinya mereka peroleh. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kehidupan politik di suatu negara adalah :

---

<sup>25</sup> Mas'ood, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.



- 
- a. Kesadaran Politik Merupakan suatu sikap penghayatan atau pemilikan seseorang terhadap nilai-nilai sebagai warga negara dalam menunaikan hak dan kewajibannya untuk menunjang dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
  - b. Kepercayaan terhadap pemerintah Merupakan suatu sikap seseorang untuk mempercayai pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diwakili oleh pejabat-pejabat pemerintah khususnya jabatan politis.
  - c. Keikutsertaan dalam kehidupan politik Merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui kegiatan-kegiatan politik serta program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang dan memberikan pengetahuan politik / pendidikan politik kepada masyarakat.

### **2.3 Teori Pola Relasi**

Hubungan antara sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation. Relasi sosial, juga disebut hubungan sosial, merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Relasi sosial atau hubungan

sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi di antara dua orang atau lebih. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness sehingga manusia juga disebut social animal (hewan sosial).<sup>26</sup>

Adapun jenis-jenis hubungan sosial adalah sebagai berikut:

1. Akulturasi

Pola akulturasi akan terjadi manakala kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaaur dan berpadu. Misalnya kita melihat bahwa kebudayaan orang Belanda di Indonesia menyerap berbagai unsur kebudayaan Indonesia, seperti cara berbusana, cara makan dan gaya berbahasa.

2. Dominasi

Pola ini akan terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain, contoh: kedatangan Bangsa Eropa ke Benua Asia untuk memperoleh SDA, atau kita jumpai dalam pengelompokan, misalnya suatu kelompok etnik

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi; suatu pengantar, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2007), hlm. 101

mendominasi kelompok etnik lain, laki-laki mendominasi perempuan, orang kaya mendominasi orang miskin, dan lain sebagainya. Secara ekstrim, misalnya proses yang terjadi dalam suatu hubungan antar kelompok, yaitu genocide (pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota suatu kelompok tertentu), pengusiran dan perbudakan. Kita lihat, misalnya, bahwa dalam berbagai kasus dominasi dilakukan bersamaan dengan pembunuhan terhadap penduduk.

### 3. Paternalisme

Suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Pola ini muncul manakala kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan.

### 4. Integrasi

Suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus atau makna penting pada perbedaan ras tersebut.

### 5. Pluralisme

Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata semua warga masyarakat. Akan tetapi pola hubungan itu lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi. Dalam pola ini solidaritas dalam masing-masing kelompok ras lebih besar. Pola mempunyai kecenderungan untuk lebih berkembang ke suatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung mengarah pada pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi. Sejak

manusia lahir dan dibesarkan, ia sudah merupakan bagian dari kelompok sosial yaitu keluarga. Di samping menjadi anggota keluarga, sebagai seorang bayi yang lahir disuatu desa atau kota, ia akan menjadi warga salah satu umat agama, warga suatu suku bangsa atau kelompok etnik dan lain sebagainya.

#### 2.4. Kerangka Konseptuan

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.<sup>27</sup> Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Agar mempermudah penelitian, maka diuraikan landasan konseptual yang menjadi kerangka berpikir.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.<sup>28</sup>

Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah

---

<sup>27</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

<sup>28</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

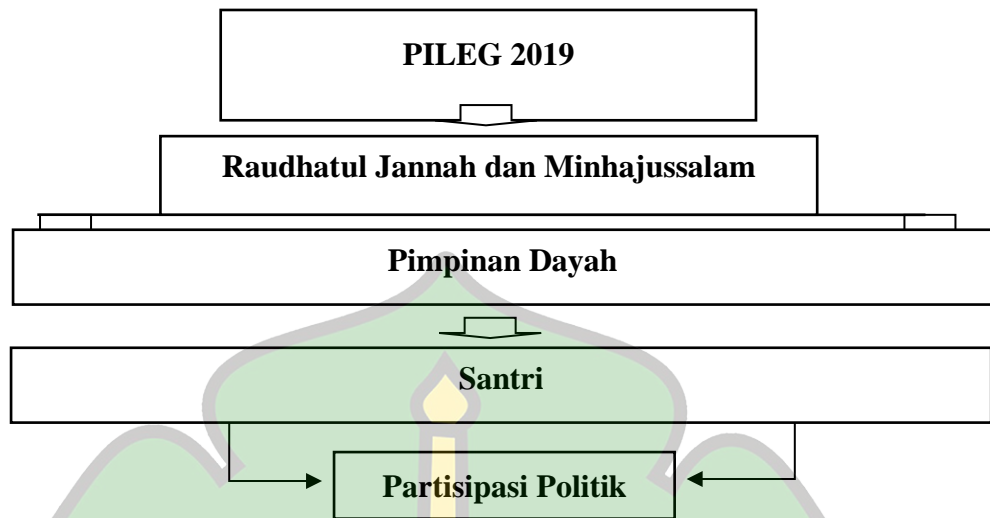
pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual. Lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:





**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Pileg tahun 2019 telah melibatkan berbagai elemen termasuk lembaga pendidikan dayah yang salah satunya ialah Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam. Keterlibatan lembaga dayah ini tidak bisa dilepaskan dari pimpinan dayah itu sendiri serta santri dayah tersebut dalam berpartisipasi dalam politik pada Pileg 2019.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan-hannya.<sup>29</sup> Penyajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>30</sup>

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri, Adapun penelitian ini dilakukan langsung di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam dalam perpolitikan Kota Subulussalam.

#### **3.3. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar-kan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi

---

<sup>29</sup> Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 4.

<sup>30</sup> Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

<sup>31</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

objek penelitian ini adalah keterlibatan santri Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam dalam perpolitikan Kota Subulussalam Pada Pileg 2019.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>33</sup>

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan pesantren, pengurus, santri dan politikus yang terlibat dalam perpolitikan Kota Subulussalam Pada Pileg 2019.

#### 3.4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, untuk lebih detailnya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

<sup>33</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

<sup>34</sup> Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>35</sup> Data primer dapat berupa data lisan maupun data secara tulisan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>36</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar

---

<sup>35</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, h. 132.

<sup>36</sup> Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...h.56.*

pencari informasi dan sumber informasi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Kategori	Jumlah/Orang
1.	Pimpinan Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam	1 Orang
2.	Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	1 Orang
3.	Ustad/Ustazah Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam	3 Orang
4.	Ustad/Ustazah Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	3 Orang
5.	Santri/Santriwati Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam yang sudah memiliki hak pilih	6 Orang
6.	Santri/Santriwati Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam yang sudah memiliki hak pilih	6 Orang
7.	Politikus	1 Orang
Total		21

<sup>37</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*,h. 118.



Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>38</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan Pemilihan Pileg 2019 Kota Subulussalam, Profil Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam serta foto-foto penelitian.

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

*Pertama*, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari

---

<sup>38</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.<sup>39</sup>

*Kedua*, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.<sup>40</sup>

*Ketiga*, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.<sup>41</sup>

### **3.6. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, apa bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis

---

<sup>39</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174.

<sup>40</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi..., h. 174.

<sup>41</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi...,h. 177.

deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

### 1. Reduksi Data

2. Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,...*, hlm 112.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kota Subulussalam yang merupakan salah satu Kabupaten/kota di provinsi Aceh. Pemberian nama Subulussalam mengandung makna ibadah, yang tujuan pemberian nama itu dicita-citakan bahwasanya Subulussalam akan menjadi Kota Ibadah. Pemberian nama seperti Subulussalam ini juga dilakukan oleh Gubernur Aceh Alm. Prof. Ali Hasyimi pada daerah-daerah perbatasan lainnya di Daerah Istimewa Aceh pada waktu itu yaitu Babussalam di Kabupaten Aceh Tenggara, Nurrussalam di Kabupaten Aceh Timur (Sekarang Aceh Tamiang).<sup>43</sup> Penjelasan lebih rinci mengenai gambaran lokasi penelitian ini sebagai berikut:

##### 4.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi Kota Subulussalam

Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang masih relatif muda juga mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota di pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh dan merupakan pintu masuk ke Aceh dari sebelah selatan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara Geografis Kota Subulussalam terletak pada posisi 02° 27' 30" - 03° 00' 00" LU/ North Latitude dan 0 97° 45' 00" - 98° 10' 00" BT/ East Latitude.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022

<sup>44</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022



Kota Subulussalam dalam konstelasi regional berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.<sup>45</sup>

Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dengan 74 Desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 14 Desa, yaitu Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 17 Desa serta Kecamatan Longkib dengan 10 Desa. Kota Subulussalam memiliki luas wilayah 1.391 km<sup>2</sup> dengan luas kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat ( $\pm 43,3\%$ ), sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Penanggalan ( $\pm 6,7\%$ ).<sup>46</sup>

#### **4.1.2. Demografis Kota Subulussalam**

Secara demografis Kota Subulussalam merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah 1.391 km<sup>2</sup> dengan luas kecamatan yang

<sup>45</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022

<sup>46</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022

terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat ( $\pm 43,3\%$ ), sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Penanggalan ( $\pm 6,7\%$ ). Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan dalam tabel berikut ini.<sup>47</sup>

**Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021**

No	Kecamatan	Luas Terbangun (Ha)	Penduduk Tahun 2017		Keterangan
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	
1	Simpang Kiri	213	28.898	57.16	Perkotaan
2	Penanggalan	93	12.317	49.72	Perkotaan
3	Rundeng	320	11.543	39.60	Perdesaan
4	Sultan Daulat	602	13.404	32.22	Perdesaan
5	Longkib	163	4.546	27.13	Perdesaan

Kepadatan penduduk di Kota Subulussalam tahun 2021 adalah 57,16 jiwa per ha pada Kecamatan Simpang Kiri, 49,72 jiwa/ha pada Kecamatan Penanggalan, 39,60 jiwa/ha pada Kecamatan Rundeng, 32,22 jiwa/ha pada Kecamatan Sultan Daulat dan 27,13 jiwa/ha pada Kecamatan Longkib. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh besarnya wilayah pada masing-masing kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Simpang Kiri yaitu sebesar 57,16 jiwa/ha dan terendah di Kecamatan Longkib sebesar 27,13 jiwa/ha.<sup>48</sup> Kepadatan penduduk dari sektor kesehatan merupakan indikator dalam melihat beberapa kondisi kesehatan yang akan

<sup>47</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022

<sup>48</sup> <http://subulussalamkota.go.id/halaman/profil-kota-subulussalam> di akses 20 November 2022

muncul terutama kondisi kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan ketersediaan air minum, air bersih, sistem pembuangan air limbah dan sampah keluarga.

#### **4.1.3. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam**

Pondok Pesantren Terpadu Raudhatul Jannah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren di bawah naungan Yayasan Auladina, berdiri sejak tahun 2007 dengan jumlah santri awal 11 anak, Raudhatul Jannah terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini jumlah santri aktif mencapai 871 anak yang berasal dari berbagai daerah di Aceh dan dari luar Provinsi Aceh.<sup>49</sup>

Yayasan Auladina berusaha menjawab kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat terutama pendidikan usia pra pesantren. Maka didirikanlah Pendidikan Usia Dini (PAUD) – TPA Al Jannah yang mendapatkan izin operasional tahun 2014 dan saat ini dipimpin oleh Ustazah Rina Wati bru Solin S.PdI. Dibantu oleh 11 orang tenaga pendidik, saat ini PAUD-TPA Al Jannah memiliki 106 peserta didik aktif. Menyusul pada tahun 2016 dibuka pula pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang diberi nama SDIT Auladina dan saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ustazah Yuli Zamzah Farliaty, S.PdI dibantu oleh 15 orang tenaga pendidik serta memiliki 123 siswa aktif. Semua

---

<sup>49</sup> <https://raudhatuljannah.ponpes.id/> di akses 30 November 2022

lembaga pendidikan ini berada di bawah binaan Pondok Pesantren Terpadu Raudhatul Jannah.<sup>50</sup>

Perkembangan yang pesat ini tentu tidak diraih dengan mudah, para pengurus dan pendidik terus berjuang dan berusaha menjadikan pesantren ini memiliki alumni-alumni yang siap berkhidmat di tengah ummat. Salah satu alasan masyarakat memilih pedidika anak-anak mereka di Pesantren ini karena Pondok Pesantren Terpadu Raudhatul Jannah telah menunjukkan prestasinya dalam berbagai ajang perlombaan baik antar pesantren-sekolah mulai tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional.<sup>51</sup>

#### **4.1.4. Pondok Pesantren Minhajussalam**

Pondok Pesantren Dayah Perbatasan Minhajussalam merupakan salah satu pondok pesantren dibawah Pimpinan Tgk. Syafruddin Al Yusufi yang terletak di desa Kampong Baru Kec. Penanggalan, kota Subulussalam. Adapun belajar mengajar di ponpes ini menggunakan kurikulum yang berlaku di tambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti karate, basket, futsal, grup belajar dan lainnya.

---

<sup>50</sup> <https://raudhatuljannah.ponpes.id/> di akses 30 November 2022

<sup>51</sup> <https://raudhatuljannah.ponpes.id/> di akses 30 November 2022



#### **4.2. Partisipasi Politik Santri di Kota Subulussalam Pada Pileg 2019**

Sebagaimana telah diketahui, pesantren merupakan institusi pendidikan agama Islam yang sangat berperan mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan membangun intelektual para santri-santrinya agar dapat mengikuti perkembangan dunia yang semakin modern lebih dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan politik. Berkembang pesatnya politik di negara Indonesia, menjadikan pesantren sebagai sasaran dalam sistem politik. Keberadaan pesantren yang dilibatkan di dalam permasalahan perpolitikan, khususnya pada saat menjelang pemilihan kepala daerah. Pesantren-pesantren dijadikan incaran politik sebagai nilai pencitraan terhadap para calon, sehingga pesantren kini telah menjadi ranah sosial politik yang dilihat dari penerimaan pimpinan pesantren terhadap kunjungan-kunjungan ke pesantren dalam rangka dukungan atau sosialisasi pencalonan.



Seiring perkembangan zaman, pesantren juga memiliki sisi kehidupan lain yang tak kalah pentingnya yaitu politik, oleh karena itu sebagaimana yang kita lihat selama ini bahwa dalam setiap momentum politik yang penting dalam sejarah bangsa, pesantren selalu terlibat.<sup>52</sup>

Untuk melihat partisipasi Santri dalam politik maka peneliti melakukan Penelitian ini dilakukan di dua pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam yang terdapat di Kota Subulussalam. Di Aceh sebagai mana diketahui pondok pesantren atau dayah merupakan institusi pendidikan agama Islam yang sangat berperan dalam mewujudkan tantangan masyarakat yang menunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan membangun intelektual santri-santrinya agar dapat mengikuti perkembangan dunia yang lebih dinamis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan politik.

Berbicara politik dalam tatanan sosial masyarakat sekarang ini, keberadaan dayah seringkali dikaitkan dengan dinamika perpolitikan, khususnya pada saat pemilihan kepada daerah. Karena itu pula, keberadaan dayah kini telah menjadi ranah sosial politik dilihat dari penerimaan pimpinan pesantren terhadap kunjungan-kunjungan ke pesantren dalam rangka meminta dukungan atau sosialisasi pencalonan. Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana partisipasi santri dalam pesantren dalam pemilihan calon legislatif khususnya di Kota Subulussalam pada tahun 2019.

---

<sup>52</sup> Ismail, F. (2009). Ideologi hegemoni dan otoritas agama: Wacana ketegangan kreatif islam dan pancasila. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Keberadaan santri di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam yang diteliti ini pada dasarnya ada temuan menarik ternyata santri yang ada di kedua pesantren ini tidak pernah menerima sosialisasi mengenai kepemiluan secara khusus namun lebih kepada masyarakat umum, seperti kepada tokoh masyarakat di gampong yang dilakukan di kecamatan, kemudian di internal penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS dan KPPS berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pileg 2019 di Kota Subulussalam.<sup>53</sup>

#### **4.2.1. Partisipasi politik santri di Pesantren Raudhatul Jannah**

Pada modern ini pesantren sudah banyak mengambil peran dalam menentukan kebijakan salah satunya dengan keikutsertaan berpartisipasi santri dalam pemilu. Hal tersebut juga dilakukan oleh Pesantren Raudhatul Jannah dalam Pemilihan legislatif Kota Subulussalam pada tahun 2019. Dalam proses pemilihan Legislatif Kota Subulussalam tahun 2019 pimpinan pesantren mendorong santri untuk berpartisipasi tanpa adanya bentuk intervensi ataupun perintah secara mutlak. yang mengharuskan para santri mematuhi secara wajib. Para santri hanya mendapatkan sejumlah masukan, gambaran dan anjuran dan tatacara berpartisipasi. Sebagaimana pimpinan pesantren mengatakan dalam wawancara kepada peneliti:

*“peran pesantren dalam mendorong santri untuk ikut berpartisipasi dalam Pileg di Kota Subulussalam pada tahun 2019 sangat besar, karena calon Kepala Daerah juga meminta dukungan kepada Pimpinan Dayah, karena suara santri lebih pasti apabila mendukung calon tertentu, ini bukan menjadi rahasia umum lagi ketika kandidat*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Tanggal 10 Oktober 2022

*kepala Daerah meminta dukungan kepada pimpinan pesantren agar pimpinan pesantren mendukung calon dan mendorong santri untuk memilih calon Kepala Daerah sekaligus anggarapan umum dari para praktisi politik.<sup>54</sup>*

Dari keterangan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pesantren modern lebih terlibat dalam partisipasinya dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Karena adanya sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Kemudian kehadiran calon kepala daerah ke pesantren juga menjadi alasan mengapa santri terlibat dalam pemilihan.

Dari hal tersebut pula dapat kita lihat bahwa Pesantren Raudhatul Jannah aktif berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Kota Subulussalam tahun 2019. Namun pihak pesantren juga memberikan keterangan bahwa jika keterlibatan pesantren harusnya didukung pula oleh penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dalam keterangan wawancara kepada peneliti, pimpinan pesantren Raudhatul Jannah mengatakan:

*“berkenaan dengan partisipasi santri, dari pihak penyelenggara pemilu tidak bisa memberikan klasifikasi secara detail karena tidak pernah melakukan pendataan secara khusus untuk santri, karena daftar pemilih tetap dilihat dari pendataan pada basis desa, namun ada anggapan bahwa keikutsertaan atau keterlibatan santri dalam kampanye atau kegiatan safari politik adalah sesuatu yang positif”.<sup>55</sup>*

Keterangan wawancara di atas peneliti menelaah bahwa keterlibatan penyelenggaraan pemilu yang masih pasif masuk kedalam pesantren untuk mesosialisasikan pemilu. Ketika penyelenggara pemilu tidak memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada aspek dan masyarakat yang ada di dalam

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>55</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Tanggal 10 Oktober 2022

lingkungan pesantren menyebabkan masyarakat pesantren merasa bahwa tidak penting adanya pemilu itu, karena factor ketidaktahuan tersebutlah partisipasi santri rendah pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Subulussalam. Pihak pesantren selama ini sudah mendorong santri untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kota subulussalam tetapi tidak menganjurkan untuk ikut dalam politik praktis seperti kampanye terutama dalam kawasan pesantren sebagai mana dalam wawancara dikatakan bahwa:

*“Selama ini pimpinan pesantren tidak pernah mendorong santri ikut serta dalam kampanye atau kegiatan seperti rapat-rapat dengan tim sukses calon legislatif. Pimpinan pesantren hanya memberikan saran kepada santri untuk memilih calon yang dianggap pimpinan beriman, bertaqwa dan baik dalam memimpin, tapi tidak pernah memaksakan kepada santri-santrinya kalau untuk kegiatan politik praktis kami tegas bahwa tidak boleh dilakukan di kawasan pesantren.”<sup>56</sup>*

Dari keterangan wawancara dengan santri di atas dapat di telaah bahwa Pesantren memberikan dorongan agar santri dapat berpartisipasi langsung dan aktif dalam pemilihan legislatif di kota Subulussalam pada tahun 2019. Kemudian perlu di garisbawahi partisipasi politik santri di pondok pesantren tidak pernah ada pemaksaan terhadap hak pilih. Namun temuan lapangan peneliti kerap kali melihat santri Raudhatul Jannah terlibat dalam beberapa kali kampanye legislatif. Bahkan pesantren terus melakukan dorongan kepada santri untuk terlibat dalam mengambil peran dalam pemilihan legislatif di Kota Subulussalam tahun 2019.

Namun secara keseluruhan keterlibatan Pesantren Raudhatul Jannah dalam pemilihan pemilihan legislatif sudah aktif, selain dari keterangan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam. 17 Oktober 2022

pimpinan pesantren di yang sudah peneliti bahas sebelumnya, hal tersebut juga di kuatkan dengan keterangan dari para santri yang peneliti wawancarai yang mengatakan sebagai berikut:

*“ikut berpartisipasi. Alasannya karena ada Calon yang memiliki visi dan misi untuk kemajuan daerah. Selain itu dengan berpartisipasi dalam memilih, akan dinilai oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik, karena mau terlibat dalam Pileg secara langsung.”<sup>57</sup>*

Dari keterangan wawancara dengan santri di atas bahwa santri dari pondok pesantren Pesantren Raudhatul Jannah sudah berpartisipasi aktif dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut juga dapat dilihat dari wawancara dibawah ini salah seorang santri yang mengatakan bahwa:

*“Saya pada pemilihan anggota dewan tahun 2019 pulang kerumah dan ikut memilih, dan pesantren juga mengizinkan. Tidak hanya saya kawan kawan juga ada yang pulang bang, bahkan kebanyakan pulang mereka.”<sup>58</sup>*

Dari keterangan santri di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada sedikitpun upaya menghambat partisipasi santri yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren.

Kemudian meskipun di atas tidak terjadinya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak pimpinan pesantren untuk memilih calon tertentu, ada santri yang memang secara terang-terangan mengakui kepada peneliti mengikuti kampanye salah satu calon legislatif tahun 2019, sebagaimana keterangan kepada peneliti:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Fajri Nur Shaleha santriwati Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam, pada Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Syahrul Ramadhan santri di pesantren Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 10 Oktober 2022



*“Saya dulu pernah duduk dengan Bang Ade Fadly ketua DPRK sekarang, dan menurut saya beliau salah satu sosok hebat. Saya pun sudah dari awal tahu beliau. Jadi saya ikut, namun kalau ditanya apakah saya kampanye di pesantren jelas saya jawab tidak ada. Saya ikut kalau ada kesempatan misalnya sedang libur.”<sup>59</sup>*

Dari keterangan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa meski mendapat larangan ikut berpolitik aktif dari pihak pesantren, masih ada santri yang ikut dalam kampanye salah satu calon anggota legislatif pada tahun 2019.

#### **4.2.2. Partisipasi politik santri Pesantren Minhajussalam**

Pesantren Pesantren Minhajussalam merupakan salah satu pesantren tradisional yang berada di Kota Subulussalam. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 santri di pesantren Minhajussalam melakukan partisipasi. Santri pesantren salafi ini sudah berpartisipasi dalam pemilihan legislatif. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari data keterangan dalam wawancara yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Minhajussalam kepada peneliti sebagai berikut:

*Kami dari pihak pesantren di melarang santri, pengajar, dan siapapun yang ada dalam lingkungan dayah untuk ikut berpartisipasi, karena memang negara menjamin hal tersebut. Cuma dalam berpartisipasi karena kami ini dayah pastinya memberikan batasan. Kampanye dan kegiatan politik yang tidak mendidik untuk apa kita ikutkan. Ya ikut sewajarnya saja sebagai warga negara.<sup>60</sup>*

Dari keterangan pimpinan pesantren pesantren Minhajussalam bahwa tidak ada larangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2019. Namun dalam berpartisipasi pesantren memberikan batasan kepada seluruh element yang berada

---

<sup>59</sup> Putra Nasution Santri Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam, pada Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022



di lingkungan pesantren, terutama tidak diperbolehkannya terlibat dalam politik praktis seperti kampanye.

Partisipasi politik sebagai warga negara yang baik adalah sebuah keharusan namun tidak serta merta harus tergabung dalam politik praktis. Penekanan seperti ini memang di utamakan kepada santri, karena tujuan santri adalah belajar datang ke pesantren. Walaupun di akui bahwa ada calon legislatif yang datang ke pesantren untuk bersilaturahmi. Hal ini di tegaskan oleh Pimpinan pesantren sebagaimana dalam keterangan wawancara kepada peneliti:

*“Memang kalau sudah adanya musim pemilu, sudah banyak caleg yang datang dan meminta dia restu kesini, iya saya terima dengan baik sebagai pimpinan. Tetapi itu sebatas silaturahmi. Bertemu dengan pimpinan dan para pengajar. Kalau bertemu santri pastinya kami dampingi agar kami bisa melihat apa yang disampaikan jangan berkampanye nanti. Karena santri mayoritasnya adalah pemilih pemula”<sup>61</sup>*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bagaimana peranan dari Pesantren untuk selalu menfilter setiap informasi yang masuk kedalam lingkungan pesantren. Tapi hal ini tidak bertujuan membatasi partisipasi hanya saja menjaga kenetralan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama.

Kemudian perlu diketahui bahwa tidak banyak partisipasi santri Dayah Perbatasan Minhajussalam dikarenakan minimnya informasi dari penyelenggara pemilu yang datang untuk sosialisasi, kembali informasi ini peneliti dapatkan dari keterangan pimpinan pesantren, yang mengatakan:

*“Mungkin karena letak dayah kami jauh, jadi jarang sekali ada sosialisasi kepemiluan dari penyelenggara pemilu yang datang kesini. Jadi wajar santri sangat minim informasi tentang pemilu ini. Karena*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022

*di Dayah Perbatasan Minhajussalam ini santri tidak di perbolehkan membawa alat komunikasi”<sup>62</sup>*

Dari wawancara di atas dapat ditelaah bahwa minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu juga menjadi alasan partisipasi santri kurang dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Hal tersebut diperkuat dari keterangan yang disampaikan oleh kepala sekolah Kepala Sekolah SMA Dayah Perbatasan Minhajussalam yang mengatakan bahwa:

*“Jarang sekali ada sosialisasi pemilu yang dilakukan di sekolah, saya juga tidak tau apa alasannya. Tapi kalau tidak disosialisasikan kita tahu bagaimana anak-anak bisa tahu mengenai pileg ini. Mereka menghabiskan waktunya di lingkungan pesantren.”<sup>63</sup>*

Minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu yang datang ke Pesantren menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi santri Dayah Perbatasan Minhajussalam. Hal yang serupa juga diakui oleh salah satu santri yang diteliti wawancara.

*“Kami dapat informasi tentang pemilihan anggota Dewan itu palingan waktu kami pulang kerumah, kalau di dayah jarang ada yang membicarakan, Ustadzah dan guru-guru pun tidak bicara tentang politik disini. Tapi saya waktu 2019 memilih kok bang”<sup>64</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa santri Dayah Perbatasan Minhajussalam berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Kota Subulussalam. Keterlibatan santri Dayah Perbatasan Minhajussalam dapat dikatakan tidak terlalu aktif. Salah satu faktornya karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tahun 2019 ke Dayah Perbatasan Minhajussalam.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>63</sup> Dasar Wasiso, Kepala Sekolah SMA Dayah Perbatasan Minhajussalam

<sup>64</sup> Sarah Santri SMA Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam

#### **4.3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri di Kota Subulussalam pada pemilihan legislatif 2019.**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan arus globalisasi, pondok pesantren dituntut untuk mengadakan perubahan-perubahan secara perlahan tanpa menanggalkan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan agama. Perubahan-perubahan yang dilakukan pesantren salah satunya adalah pesantren dikembangkan tidak hanya mengajarkan tentang agama atau kitab kuning saja, tetapi juga pesantren juga ikut berpartisipasi dalam sosial, budaya dan politik. Hal itu juga dirasakan oleh pihak pesantren yang ada di Kota Subulussalam kemudian seperti yang sudah peneliti sajikan di atas maka ada partisipasi santri pada pemilihan legislatif tahun 2019. Untuk lebih detailnya mengenai hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

##### **1. Raudhatul Jannah Kota Subulussalam**

###### **a. Pengetahuan dan Pendidikan Politik Santri**

Pesantren Raudhatul Jannah merupakan salah satu pesantren modern yang ada di kota subulussalam. sebagaimana pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi santri pesantren Pesantren Raudhatul Jannah sudah terlibat banyak dalam kegiatan politik. Meskipun pihak pesantren sangat membatasi praktik politik praktis di dalam lingkungan pesantren. Bagi sebagian santri yang mempunyai pengetahuan mengenai politik mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pilihan politiknya, bagi mereka dalam memilih pasangan calon tertentu tidak semata-mata hanya dari rujukan figur-figur atau tokoh yang dianggap disegani oleh

masyarakat, namun perlu dilihat juga dari segi kualitas pasangan calon, santri harus tahu pemimpin seperti apa yang akan mereka pilih apakah pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas dan kompetensi dibidangnya, serta track record yang jelas.

#### **b. Pengaruh pimpinan pesantren**

Pada suatu lembaga pendidikan sangat di pengaruhi oleh pimpinannya, terlebih jika lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan agama. Hal itu terjadi juga di pesantren Raudhatul Jannah. Yang mana partisipasi politik santri sedikit banyaknya di pengaruhi oleh peran dari pimpinan dayah. Memang dalam pemilihan legislatif tahun 2019 pimpinan Raudhatul Jannah tidak mengajak santri untuk memilih salah satu calon, hal ini di sampaikan dalam wawancara kepada peneliti:

*“Kami pihak pesantren tidak memobilisasi santri untuk harus memilih calon tertentu, hanya saja kami mengingatkan para santri untuk memilih pemimpin yang peduli dan juga adil.”<sup>65</sup>*

Dalam perspektif pemerintah, otoritas kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial dan politik masyarakat termasuk terhadap pilihan politik santri, sebagaimana hasil wawancara:

*Pihak dayah hanya memberikan motivasi kepada santri agar memilih calon yang bagus visi misinya. Tidak ada dorongan dari pimpinan dayah, cuma kami diizinkan pulang ketika hari pemilihan.<sup>66</sup>*

Pesantren tidak pernah melarang partisipasi santri dalam pemilihan bahkan malah memberikan dorongan terlibat. Tetapi selalu saja di ingatkan kepada

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022

santri untuk tidak berkampanye terutama di lingkungan pesantren. Tidak pernah sekalipun pesantren mendorong santri untuk mendukung calon tertentu. Hal tersebut di benarkan oleh santri Raudhatul Jannah kepada peneliti ia mengatakan:

*“Kalau masalah politik abu jarang berbicara kepada kami, tapi abu sering berpesan untuk jadi santri yang baik jika kembali kemasyarakat harus berguna, kalau pilih pemimpin yang adil, yang tau agama. Jangan asal pilih.”<sup>67</sup>*

Dari keterangan wawancara di atas, bahwa santri memang kerap kali mendapatkan pemahaman mengenai memilih pemimpin, namun pihak pesantren membatasi partisipasi santri hanya pada tingkatan memilih saja tidak boleh terlibat dalam kampanye. Sebagaimana disampaikan kepada peneliti dalam wawancara:

*“sekarang ini partisipasi santri hanya sebatas memilih saja, untuk ikut kegiatan politik seperti kampanye, tidak dan belum pernah ikut”.<sup>68</sup>*

Dari keterangan wawancara tersebut dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa keterlibatan santri dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan legislatif. Pihak pesantren sudah melakukan banyak upaya dorongan. Namun ada penegasan bahwa hanya boleh berpartisipasi tetapi tidak diperbolehkan melakukan politik praktis seperti berkampanye.

Pendapatnya bahwa mereka terlibat dalam pemilihan walaupun kerap kali mendapatkan ajakan untuk melakukan kampanye yang

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Mustajadin Santri Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022



menurutnya itu tidak baik dilakukan di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan berbasis agama. Pegakuan lainnya dari salah seorang praktisi politik Ade Fadli Bintang yang pada pemilihan 2019 memenangkan kursi Dewan Perwakilan Kota Sebagai ketua menyebutkan bahwa mereka:

*“tidak pernah melibatkan santri secara langsung dalam kampanye atau untuk memobilisasi pemilih lain agar memilih calon legislatif yang didukung oleh Partai, tapi kalau meminta dukungan kepada pimpinan pesantren tentu ada, demikian juga partai lainnya”.*<sup>69</sup>

Dari wawancara diatas dapat kita telaah bahwa Ketua DPRK tidak melibatkan santri dalam kampanye atau politik praktis tetapi berharap kepada santri untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Namun di akui kalau meminta doa restu serta dukungan dari pimpinan partai politik itu ada. Perihal memohon doa restu yang di lakukan oleh calon anggota legislatif juga di benarkan oleh pimpinan pesantren Pesantren Raudhatul Jannah Ustadz Nasrullah S.Pd dalam wawancara mengatakan kepada peneliti bahwa:

*Kalau sudah musim pemilu kami banyak kedatangan anggota legislatif untuk bersilaturahmi, dan juga dari cara mereka memohon doa restu, pastinya mereka ingin didukung. Dalam hal seperti ini kami terbuka untuk siapapun datang bersilaturahmi. Tetapi santri tidak akan kami libatkan karena ini juga berupa bentuk kampanye dan bisa saja public akan menilai lain nantinya”*<sup>70</sup>

Dari keterangan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pesantren Raudhatul Jannah tidak menutup ruang kepada calon legislatif untuk berkomunikasi dengan pihak pesantren, dan juga di anggap sebagai bentuk silaturahmi.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Praktisi Politik, Tanggal 13 Oktober 2022

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022



Pimpinan Pesantren Minhajussalam juga menjelaskan bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Subulussalam santri sudah terlibat aktif, hal ini di sampaikan dalam wawancara, ia mengatakan:

*“Bahkan wujud dari partisipasi politik santri sebagai wujud warga negara yang baik adalah di antaranya ikut berpartisipasi aktif dalam legislatif baik DPRK, DPRA, DRI RI dan DPD RI ada sebagian santri menjadi anggota KPPS, namun yang paling banyak adalah hanya memilih calon legislatif pada hari pemilihan saja.”<sup>71</sup>*

Dari keterangan di atas dapat dilihat bagaimana pesantren terus mengawal bentuk komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan oleh calon legislative agar tidak ada terjadi kampanye kepada santri. Karena hal tersebut dapat di tafsirkan berbeda oleh masyarakat yang bisa saja beranggapan bahwa pesantren sudah bermain politik praktis. Pesantren sudah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang netral dalam mendidik.

## **2. Dayah Perbatasan Minhajussalam**

### **a. Pengetahuan dan Pendidikan Politik Santri**

Pendidikan politik yang terjadi di dalam pondok pesantren Dayah Perbatasan Minhajussalam tidak secara formal diajarkan karena fokus pondok yang hanya mengajarkan ilmu agama saja. Namun dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan pendidikan politik tetap berjalan di kalangan santri karena banyak diantara mereka yang menempuh Pendidikan formal seperti perkuliahan. Pendidikan politik yang diajarkan di pondok hanya sebatas wejangan dan nasehat dari sang kiai untuk menggunakan hak dalam berpolitik secara baik dan benar. Nasehat tersebut tidak berupa penjelasan mengenai politik itu apa dan bagaimana,

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam., Tanggal 17 Oktober 2022

namun lebih menekankan pada bagaimana menjalankan politik benar dan baik sehingga para santri dalam menjalankan hak politiknya sesuai dengan hati Nurani dan pertimbangan akal yang rasional.

Pihak pondok pesantren konsisten untuk tidak ikut campur dalam dunia politik dan lebih memberikan kebebasan pada santrinya untuk melakukan aktivitas politik. Pondok pesantren fokus sebagai lembaga penyiaran agama dan masjid pondok pesantren berfungsi sebagai masjid umum yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid pesantren sering digunakan untuk menyelenggarakan majlis taklim, diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya oleh masyarakat umum. Sebagaimana dalam keterangan wawancara yang disampaikan oleh pimpinan Daya kepada peneliti:

*Saya pernah terlibat dalam politik praktis tetapi itu dulu sekali, saat masih di Aceh selatan. Namun kalau sekarang hanya terlibat sekedar saja, sebab sebagaimana tujuan dayah ini ada adalah untuk mengajarkan ilmu agama, agar kelak ada generasi yang peduli terhadap agama dan memperjuangkan keadilan.<sup>72</sup>*

Sebagaimana keterangan dari pimpinan Dayah dapat di telaah bahwa bahwa pembicaraan mengenai politik hanya sebatas saja tidak mendalam untuk memberikan definisi, politik itu apa secara detail.

Bagi santri yang menempuh pendidikan formal mereka mendapatkan banyak pengetahuan mengenai politik ketika di luar pesantren, pengetahuan politik mereka dapatkan ketika berada dalam pendidikan formal seperti di bangku sekolah ataupun berada di kampus

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022

dan dari lingkungan pergaulannya, akan tetapi pengetahuan yang mereka dapatkan tidak begitu mendalam mengenai politik hanya sebatas tahu saja dasar-dasar mengenai politik. Pendidikan politik perlu diajarkan kepada santri untuk menjadikan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik tersebut, selain itu dengan adanya pendidikan politik setiap individu akan lebih jauh dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran untuk mengemban tanggungjawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kesadaran berpartisipasi dalam dunia politik.

**b. Pengaruh Pimpinan Pesantren**

Didayah Perbatasan Minhajussalam pimpinan sangat berpengaruh dalam seluruh aspek, bahkan santri kerap kali mengikuti apa yang pimpinan lakukan bahkan sampai kepada cara berpakaian. Hal ini menjadi salah satu rasa hormat kepada pimpinan atau di Dayah Perbatasan Minhajussalam. Namun dalam partisipasi Dayah Perbatasan Minhajussalam politik tidak melibatkan santri dalam politik praktis. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenetralan lembaga pendidikan sebagai lembaga produksi dan peningkatan SDM masyarakat. Karena dikemudian hari santri-santri ini juga akan kembali kemasyarakat. Penegasan tidak melibatkan santri kedalam politik praktis juga disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantrem Minhajussalam mengemukakan bahwa:

*“kami tidak pernah melibatkan santri dalam kampanye partai untuk mendengar visi misi calon kandidat yang didukung partai, namun tentu saja melakukan kunjungan dan mengimbuu saja agar santri*

*diharapkan dapat memilih kandidat yang didukung partai pada hari pemilihan. Karena memang ini merupakan salah satu strategi partai untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajussalam.”<sup>73</sup>*

Dari keterangan wawancara diatas dalam di ambil simpulan bahwa Dayah Perbatasan Minhajussalam tidak menutup ruang untuk siapapun politisi yang ingin berkunjung kedalam pesantren. Tetapi di tegaskan bahwa Dayah Perbatasan Minhajussalam di akan memperbolehkan dan melibatkan santri kedalam politik praktis seperti berkampanye. Batasan santri hanya di arahkan dan didorong untuk mengambil peran serta berpartisipasi. Sebagaimana dalam wawancara mengatakan:

*“bagi santri yang telah memiliki hak pilih, sudah berpartisipasi memberikan dukungan dan memilih calon legislatif pada hari pemilihan lalu yang mana santri yang sudah punya hak pilih dapat pulang ke Gampong masing-masing untuk memilih, karena di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Pondok Pesantren Minhajussalam tidak disediakan TPS, namun pidak pesantren memberikan izin khusus bagi santri yang sudah memiliki hak pilih, agar bisa pulang ke Gampongnya untuk memilih calon legislatif.”<sup>74</sup>*

Namun demikian, pihak Dayah Perbatasan Minhajussalam Jannah juga mengakui bahwa pastinya ada santri yang terlibat dalam politik prakti entah memiliki kerabat atau memang sudah menentukan pada siapa pilihanya. Namun dapat dipastikan bahwa santri tidak pernah ikut berkampanye sebagaimana hal tersebut di disampaikan oleh pimpinan pesantren:

*“Kalau untuk kampanye santri tidak pernah ikut serta, karena santri lebih mementingkan pengajian dari pada ikut kampanye calon legislatif. Santri tidak diperbolehkan untuk ikut dalam kampanye*

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022

*partai atau calon Kepala Daerah manapun, karena itu bukan kegiatan yang baik bagi santri, karena santri harus fokus dan berkonstrasi untuk belajar di Pondok.*<sup>75</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh pimpinan dayah sebagaimana dalam keterangan wawancara di atas, bahwa tidak akan dilibatkan dalam politik praktis seperti berkampanye. Karena santri yang di bentuk memang di fokuskan untuk belajar agar ketika nanti kembali kemasyarakat dapat membangun masyarakat.

Tidak mendorong santri terlibat dalam politik praktis seperti berkampanye juga dengan tujuan agar santri fokus untuk menempuh pendidikan. Walaupun ada santri yang sudah sampai ambang usia untuk terlibat dalam dunia politik dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Tetapi pihak Dayah Perbatasan Minhajussalam tidak pernah menutup ruang untuk santri belajar dan berpartisipasi dalam politik. Pesantren juga tidak mengikutkan santri dalam kegiatan politik yang di selenggarakan pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2019. Hal tersebut berulang kali di tegaskan dalam wawancara oleh pimpinan pesantren, kepada peneliti menyampaikan:

*“Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang lalu, “santri yang usia di bawah 25 tahun tidak kami izinkan untuk ikut dalam kegiatan politik yang dibuat oleh partai, tim sukses calon legislatif karena santri harus fokus dengan pengajian pesantren. Kalau pun ada calon Kandidat yang datang ke pesantren sekalipun. Santri fokus ke pengajian bukan ke kampanye calon.”*<sup>76</sup>

Hal tersebut juga demi menjaga nama baik pesantren dari stigma yang beredar yang kalau sudah mendekati pemilihan pesantren kerap menjadi sorotan karena

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>76</sup> Wawancara dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam, Tanggal 19 Oktober 2022



banyak calon yang berdatangan. Pesantren menerima siapapun yang datang dengan niat bersilaturrahi dan sejauh pemilihan baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah pada tahun 2019 pesantren tidak pernah mengikat janji secara khusus dengan calon manapun, sebagaimana dalam wawancara disampaikan sebagai berikut:

*“Pihak dayah juga mengakui bahwa pada dasarnya tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan pilkada secara khusus untuk mendorong santri agar aktif dalam Pileg 2019, akan tetapi pimpinan dayah hanya memberikan izin kepada santri untuk pulang dan memilih sesuai dengan pilihan yang diinginkan”.<sup>77</sup>*

Dalam penelitian ini ada temuan menarik ternyata dalam proses partisipasi pesantren modern lebih berpartisipasi dan memberikan dorongan untuk andlil dari para santri berpartisipasi dalam dunia politik. Hal tersebut masih sangat jarang dilakukan oleh pesantren salafi.

Selain itu juga ada factor tehnologi yang mempengaruhi partisipasi satri. Dari media social para santri bisa mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Legislatif. Dengan demikian keinginan untuk mengabil peran dalam pemilihan atau berpartisipasi.

Jadi dari pembahasan di atas bahwa dapat ditarik benang merah, bahwasannya patron-klien yang ada di pesantren Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam berpengaruh terhadap partisipasi santri untuk ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2019 namun tidak ikut berpengaruh kepada keterpilihan calon tertentu.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam, Tanggal 17 Oktober 2022



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi politik santri di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Subulussalam adalah partisipasi aktif. Karena santri tetap dipersilahkan untuk ikut serta dalam berpartisipasi pada pemilihan legislative tahun 2019 di Kota Subulussalam. Kemudian partisipasi politik santri sangat jelas dengan cara pulang ke kampungnya masing-masing.
2. Pesantren menghindari santri-santrinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye dalam kawasan pesantren untuk mendukung salah satu pasangan calon dari partai-partai politik manapun. Namun, pesantren tidak memobilisasi santri untuk berpihak pada calon legislatif lainnya, semua tergantung pilihan santri dalam menentukannya masing-masing. Partisipasi aktif santri dilakukan dengan pilihan yang rasional yaitu dengan membaca artikel, opini, tulisan para guru-guru besar yang ada di dalam Pesantren. Meskipun adakalanya santri merupakan pemilih yang sifatnya patron-klien atau lebih disebut dengan meneladani penuh hormat ke gurunya.
3. Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan Dayah Perbatasan Minhajussalam sama-sama memberikan pembatasan bentuk partisipasi, yaitu memberikan batasan kepada setiap santri hanya di perbolehkan untuk

mengikuti pemilihan legislatif, tetapi tidak dibenarkan melakukan kampanye di dalam kawasan pesantren untuk menjaga integritas dan kenetralan lembaga pendidikan.

## 5.2 SARAN

Dari penulisan skripsi ini, peneliti mempunyai beberapa saran untuk badan pengurus:

1. Pesantren Pesantren Raudhatul Jannah untuk lebih meningkatkan keaktifan santri dalam menentukan pilihannya. Terutama dalam bidang keilmuan atau ideologi santri yang perlu diolah secara matang. Sehingga apa yang menjadi pilihannya dapat menghasilkan kepuasan dalam memilih. Pendidikan yang ada di dalam pesantren juga lebih ditingkatkan nilai-nilai pengetahuannya terhadap sistem politik yang baik, untuk bangsa dan negara.
2. Dayah Perbatasan Minhajussalam untuk meningkatkan keaktifan partisipasi santri. Kemudian lebih terbuka secara kerjasama dengan pihak penyelenggara pemilu. Dan juga melakukan pendidikan politik agar para santri tidak apatis dan juga mengetahui mengenai informasi pemilu yang di selenggarakan di kota Subulussalam.

Mari kita gunakan hak pilih, proses politik dan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Motivasinya sebagai semangat masyarakat yaitu santri agar tidak dianggap sebagai seorang santri yang tidak peduli terhadap masa depan negara dan tidak hanya mementingkan kehidupan sendiri. Jauhkan dari perilaku yang

mengakibatkan golongan putih (golput). Kepedulian anak bangsa adalah kemaslahatan bangsa dan negara di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aklima, Ramzi Murziqin, Reni Shintasari dan Aja Sanawiyah, *Partisipasi Politik Santri dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Politik Vol.3 No.2.
- Almuhajir, Politik Penyetaraan Dayah di Aceh, *Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 25 Nomor 2*, Lhosumawe: STAIN Malikussaleh, 2014
- Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Aspinal dan Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta. PolGov, 2015.
- Basrowi& Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta : Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hamdan Haris, *Patronase dan Afiliasi Santri Pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara, Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin, 2018
- Hefni, *Patron-Klien Relationship pada Masyarakat Madura*. Jurnal Karsa Vol 15 No (1). 2009.

Jedri dan Tinov, *Analisis Hubungan Patron-Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011*, Jurnal Politik Vol 1 No 2. 2012.

Mashuri, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah*. *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. XIII. No. 2. (Februari). (<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/didaktika/article/download/477/395>)

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2006

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009

Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 19

Rofik Anwar, *Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014*, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2014.

Rokhman, *Hubungan Patron-klien Antara Pemilik dan Penarik Perahu Tambang di Daerah Pagesangan-Surabaya*, *Jurnal Paradigma Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015*.

Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006)*, *Skripsi*. Yogyakarta: 2008.

Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. *The American Political Science Review*. Vol 66. No 1. pp 91-113. (online).



<http://chenry.webhost.utexas.edu/pmena/coursemats/2009/Scott-1972->

[clientelism.pdf](#) Diakses tanggal 28 Maret 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi

### 2. DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.



Foto bersama dengan Ustadz Nasrullah S.Pd Selaku Wakil Pimpinan 2 Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam.



Foto bersama dengan Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam.

Gambar 3.



Foto bersama dengan para santri Pesantren Raudhatul Jannah Kota Subulussalam.



Gambar 4.



Foto bersama dengan Tgk. Safruddin Al Yusufi selaku Pimpinan Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam.

Gambar 5.



Foto bersama dengan Bapak Dasar Wasiso selaku Kepala Sekolah SMA Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam.

Gambar 6.



Foto bersama dengan para Guru Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam.

Gambar 7.



Foto bersama dengan para Murid Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam.